

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU

- Akerlof, G. A. (1970). *The market for lemons*. Princeton University Press.
- Arief, B. N. (2008). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*.  
Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ashshofa, B. (2007). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*.  
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta:  
Gadjah  
Mada University Press.
- Halim, A., dkk. (2011). *Pengelolaan keuangan negara-daerah: Hukum, kerugian  
negara, dan BPK*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Surabaya:  
Bayumedia.
- Indroharto. (1993). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata  
usaha  
negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Irianto, S., & Sidharta. (2009). *Metode penelitian hukum: Konstelasi dan refleksi*.  
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kamaroesid, H., dkk. (2010). *Pembuat komitmen: Wewenang dan tanggung  
jawab  
dalam pelaksanaan APBN/APBD*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mahmud Marzuki, P. (2013). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana  
Prenada Media Group.

Mahendra Romus, & Museliza, V. (2021). *Pengadaan barang dan jasa pemerintah:*

*Proses, regulasi, dan permasalahan hukum.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Makarim, E. (2009). *Tanggung jawab penyelenggara terhadap tata kelola yang baik*

*dalam sistem elektronik.* Depok: FHUI.

Rajagukguk, E. (2019). *Hukum keuangan negara.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ridwan, H. R. (2014). *Hukum administrasi negara.* Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Saidi, M. D. (2008). *Hukum keuangan negara.* Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Santoso, B. (2020). *Pengadaan barang dan jasa pemerintah: Perspektif hukum dan praktik.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum.* Jakarta: UI Press.

Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.* Jakarta:

Rajawali Pers.

Sutedi, A. (2018). *Aspek hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah.* Jakarta:

Sinar Grafika.

Thai, K. V. (2001). *Public procurement: Concepts and practices.* Florida:

PrAcademics Press.

Yukins, C. (2012). *A versatile prism: Assessing procurement law through the principal-agent model.* Washington, DC.

## **JURNAL**

Beridiansyah. (2017). Analisis yuridis terhadap pengadaan barang dan jasa guna mencegah korupsi. *Jurnal Integritas*, 3(2).

Darwin Pane, M. (2017). Aspek hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 147–150.

- Ferdinand, A. K., et al. (2020). Penegakan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal FH Unila*, 4(2), 96.
- Haryati, D., Anditya, A., & Wibowo, R. A. (2011). Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. *Mimbar Hukum*, 23(2), 328–342.
- Hardiyana, S. P. (2023). Perspektif hukum dalam keterbukaan dan transparansi kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Perspektif Hukum*, 23(2), 262–283.
- Mulyono, P. E. (2017). Analisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. *Airlangga Development Journal*, 1(1), 32–42.
- Nurmandi, A. (2020). E-procurement and corruption prevention in Indonesia. *Journal of Public Procurement*.
- Novindrastuti, A. (2019). Transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Novindrastuti, A., Suartini, & Hidayat, Y. (2024). Kajian hukum tentang e-tendering dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi. *Binamulia Hukum*, 13(2), 447–459.
- Putra, H. C., & Iskandar. (2022). Konsep pengelolaan keuangan negara dan barang publik. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 2(2).
- Rahayu, R., & Murtinah, T. S. (2022). Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, 4 (2).
- Reza, D., et al. (2023). Analisis penerimaan dan pengeluaran negara Indonesia tahun 2019–2021. *Journal of Economic Education*, 2(1), 1–15.
- Sari, D., & Nugraha, A. S. (2021). Professionalism of procurement officials. *Jurnal Administrasi Publik*.

## **PERATURAN PERUNANG-UNDANGAN**

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang LKPP.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

LKPP. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi JF PPBJ.

LKPP. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha PBJ.

LKPP. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang E-Purchasing.

#### **PUTUSAN/DOKUMEN KASUS**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Putusan Nomor 02/KPPU-L/2024.*

#### **SUMBER INTERNET, LAPORAN, DAN DOKUMEN RESMI**

Badan Pemeriksa Keuangan RI. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester.*

Katadata. "KPK Tindak 154 Kasus Korupsi pada 2024." Diakses 10 Desember 2025.

KPK. *Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.* Jakarta, 2021.

LKPP. *Laporan Kinerja (LAKIN) LKPP Tahun 2022.* Jakarta, 2023.

LKPP. *Pedoman Pembinaan UKPBJ sebagai Center of Excellence.* Jakarta, 2020.

LKPP. *Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Audit Trail.* Jakarta, 2020.

Hukumonline. "E-Procurement: Cara Pengadaan Bersih dari Korupsi." Diakses 2 Desember 2025.